

MODEL PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN: SOLUSI STRATEGIS PENGUATAN MODAL USAHA KECIL AGRIBISNIS DI SUMATERA SELATAN

M. Syahirman Yusi

Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijayanegara Palembang, 30139.

Abstract

The objective of this study was to obtain the empirical evidence about the effect of financial development model toward the agribusiness small scale enterprises in South Sumatera. Primary data was collected through survey technique from 142 samples. Respondents were taken by using random sampling method and was analysed by using multiple regression. Statistical analysis showed that all of variables which consisted of business climate, bank's credit, entrepreneurship, the micro financial institutions, partnership, and multifinance credit had a positive influence. It meant that the hypothesis was not rejected. Among those variables, business climate was the most dominant factor. It meant that in strengthening the small scale enterprises' capital, the role of government which created the condusive business climate became the most important factor, but in partial the entrepreneurship variable did not have significant effect. It meant the hypothesis was rejected.

Key words: *small scale enterprises, financial development, capital strengthening*

Penelitian ini berangkat dari latar belakang bahwa keberadaan usaha kecil agribisnis di Sumatera Selatan cukup signifikan jika dibandingkan dengan keberadaan usaha kecil secara keseluruhan yaitu sebanyak 1.465 unit usaha atau 26,08%, investasi tertanam sebesar Rp.21.315.032.000,00 atau 21,61% dan serapan tenaga kerja sebanyak 8.044 orang atau 20,45%. Dalam upaya pemerataan dan penyeimbangan kegiatan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, usaha kecil perlu dikembangkan sebab salah satu dari tujuh program pembangunan pemerintah Sumatera Selatan adalah pengembangan usaha kecil di samping pertanian, pertambangan, per-

kebunan, kehutanan, pariwisata, dan maritim (Sumsel dalam Angka, 2011).

Meskipun dalam prakteknya pemberdayaan pada usaha kecil agribisnis di Sumatera Selatan telah dilakukan, namun pada kenyataannya banyak masalah baik internal maupun eksternal yang dihadapi belum teratasi. Akibatnya keberadaan usaha kecil ini belum maksimal memberikan kontribusinya pada perkembangan ekonomi daerah, baik terserapnya tenaga kerja maupun sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kurangnya permodalan tetap merupakan dilema usaha kecil di Sumatera Selatan, karena pada

Korespondensi dengan Penulis:

M.Syahirman Yusi: Telp. +62 711 353 414, Fax: +62 711 355918
E-mail: msyusi@gmail.com

umumnya usaha kecil di Indonesia merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal pemilik yang jumlahnya sangat terbatas (Oswari & Bastias, 2007).

Hasil penelitian Yusi (2007) juga menemukan bahwa keterbatasan modal usaha kecil agribisnis di Sumatera Selatan, terutama disebabkan oleh tidak adanya akses langsung mereka terhadap layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (bank) maupun nonbank. Ini berarti bahwa sebagian besar atau seluruh dana yang diperlukan untuk investasi (perluasan usaha atau peningkatan volume produksi) dan modal kerja berasal dari sumber informal. Sumber pembiayaan ini sangat bervariasi, dapat tabungan pribadi (pemilik atau pengusaha), pinjaman atau bantuan keuangan dari keluarga atau kenalan, pinjaman dari pemasok bahan baku dalam bentuk pembayaran belakangan, uang dalam bentuk pembayaran dimuka (sebagian atau seluruhnya) dari pembeli, pinjaman pedagang, tengkulak, sampai dengan bagian keuntungan yang seharusnya diinvestasikan. Dengan keterbatasan modal yang dipunyai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan baik mutu maupun produktivitas menjadi terhambat. Mutu produk yang kadang sedanya dengan jumlah barang yang dihasilkan terbatas mengakibatkan peluang pasar yang tadinya dapat mereka raih menjadi terlewatkan.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, penguatan modal pada usaha kecil mutlak diperlukan agar tumbuh dan berkembang. Menumbuhkembangkan usaha kecil setidaknya dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak usaha kecil intensif dalam menggunakan sumber daya alam lokal. Kedua, usaha kecil memegang peranan yang tidak kecil dalam ekspor nonmigas. Ketiga, struktur ekonomi Indonesia yang berbentuk piramida telah mencuatkan isu dualisme industri. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2006 dari total 22,7

juta perusahaan di Indonesia ternyata usaha mikro dan kecil mendominasi dari sisi unit usaha (99,1%) dan penyerapan tenaga kerja (84,4%) (Kuncoro, 2008).

Melihat fenomena yang dihadapi, pengembangan model pembiayaan yang komprehensif dan integralistik mutlak diperlukan. Integral artinya melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, termasuk pemerintah dan dunia usaha yang didasarkan pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta terintegrasi, sedangkan komprehensif bermakna, usaha kecil harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sebagai bagian dari ekonomi nasional.

METODE

Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, tetapi juga menerangkan hubungan dan menguji hipotesis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha kecil agribisnis yang ada di Sumatera Selatan yaitu sebanyak 1.465 unit usaha. Lebih lanjut dalam teknik pengambilan sampel, mula-mula Sumatera Selatan dibagi ke dalam kelompok-kelompok menurut kabupaten/kota. Kemudian kabupaten/kota yang jumlah pengusahanya lebih dari 100 ditetapkan sebagai unit sampling primer, dan dari unit sampling primer tersebut diambil sebagian. Daerah sampel yang diambil meliputi empat kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Jumlah sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus Slovin dengan derajat kesalahan sebesar 0.08, proporsi sampel ditetapkan sebesar 0,5. Dengan demikian besarnya sampel diketahui sebanyak 141,28 atau dibulatkan menjadi 142 pengusaha. Lebih lanjut sampel untuk daerah terpilih ditetapkan secara proporsional.

Uji validitas instrumen dilakukan dengan analisis butir menggunakan rumus *Rank Spearman*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan teknik belah dua (*split half*). Teknik belah dua dilakukan dengan cara membagi dua kelompok item yaitu kelompok bernomor ganjil dan kelompok bernomor genap. Skor masing-masing item pertanyaan dijumlahkan, kemudian skor total belahan ganjil dikorelasikan dengan skor total belahan genap dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment Pearson*.

Sejumlah variabel yang diteliti dibagi dalam dua kelompok, yaitu: variabel tidak bebas (Y), yaitu penguatan modal usaha. Variabel bebas (X), terdiri dari: variabel X_1 : iklim usaha; variabel X_2 : perkreditan perbankan; variabel X_3 : kewirausahaan; X_4 : lembaga keuangan mikro; X_5 : kemitraan; X_6 : kredit *multifinance*. Semua skala variabel adalah ordinal, agar dapat diolah secara statistik parametrik (regresi) skala ordinal terlebih dahulu ditingkatkan skalanya menjadi interval dengan menggunakan *successive interval method*.

Analisis regresi digunakan untuk eksplanasi, yaitu prediksi nilai variabel bebas bilamana nilai variabel tidak bebas diketahui atau berubah. Bentuk hubungan dinyatakan dalam model persamaan regresi yang signifikan, dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e_i$$

Keterangan:

Y = penguatan modal usaha

X_1 = iklim usaha

X_2 = perkreditan perbankan

X_3 = kewirausahaan

X_4 = lembaga keuangan mikro

X_5 = kemitraan

X_6 = kredit *multifinance*

e_i = kesalahan pengganggu.

Pengujian asumsi klasik menggunakan metode OLS yang dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE, yakni tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi, dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Oleh karena itu uji asumsi klasik perlu dilakukan.

Uji hipotesis menggunakan uji F statistik, untuk menguji signifikansi pengaruh dari seluruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel tidak bebas. Uji t statistik, untuk menguji secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Baik uji F maupun uji t ditentukan tingkat signifikansinya 5%. Koefisien determinasi, untuk menguji seberapa besar kontribusi kemampuan menjelaskan variabel bebas secara serentak terhadap variabel tidak bebas dimana besarnya $0 < R^2 < +1$.

HASIL

Untuk menguji apakah data-data dari sampel penelitian telah berdistribusi normal digunakan uji Chi Square terhadap nilai standar residual hasil persamaan. Bila probabilitas hasil Chi Square lebih kecil dari 5% maka terdistribusi normal demikian sebaliknya. Hasil pengujian menunjukkan nilai Chi Square sebesar 145.8634 dan probabilitas 0.0000 yang berarti residual data terdistribusi secara normal.

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,785238 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel-variabel model pengembangan pembiayaan yang meliputi: iklim usaha, perkreditan perbankan, kewirausahaan, lembaga keuangan mikro, kemitraan, dan kredit *multifinance* mempunyai hubungan yang kuat dengan upaya penguatan modal usaha.

Lebih lanjut dari perhitungan juga diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,6165, hal ini menunjukkan bahwa 61,66% upaya penguatan modal usaha kecil di daerah penelitian dipengaruhi oleh variabel-variabel pengembangan pembiayaan yang ditetapkan, sedangkan sisanya 38,35% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Koefisien determinasi R^2 yang nilainya berkisar dari 0-1 menunjukkan ukuran akurasi model. Semakin besar nilai R^2 menunjukkan semakin kecil nilai ei, yang pada prinsipnya model semakin mendekati data yang sebenarnya dan dikatakan model semakin akurat, sehingga prediksi nilai variabel tak bebas oleh variabel bebas semakin tepat.

Uji Serentak (Uji F)

Koefisien yang dihasilkan dari uji F Anova menghasilkan F-hitung = 18,6482 dengan signifikansi 0,0000 lebih besar dari nilai F-tabel untuk $n= 150$ adalah 2,18 yang berarti bahwa ketepatan prediksi antara variabel bebas dan variabel tak bebas yang dispesifikasi dalam model mempunyai peluang salah sebesar 0,0%. Angka ini menjelaskan pula hipotesis yang menyatakan bahwa model pengembangan pembiayaan secara serentak dapat diterima. Diterimanya hipotesis ini membuktikan bahwa variabel bebas X_1 (iklim usaha), X_2 (perkreditan perbankan), X_3 (kewirausahaan), X_4 (lembaga keuangan mikro), X_5 (kemitraan), dan X_6 (kredit

multifinance) secara statistik berpengaruh nyata terhadap variabel penguatan modal usaha kecil agribisnis Sumatera Selatan.

Uji Parsial (Uji t)

Perhitungan secara parsial memperlihatkan bahwa X_1 (iklim usaha), X_2 (perkreditan perbankan), X_4 (lembaga keuangan mikro), X_5 (kemitraan), dan X_6 (kredit *multifinance*) secara statistik berpengaruh nyata terhadap variabel penguatan modal usaha kecil, hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung yang lebih besar dari nilai t-tabel = 1,960. Hanya satu variabel variabel bebas yang tidak berpengaruh nyata yaitu variabel X_3 (kewirausahaan), nilai t-hitungnya lebih kecil dari nilai t-tabel. Ini memperlihatkan bahwa masalah keterampilan wirausaha tidak merupakan hambatan bagi usaha kecil agribisnis di daerah penelitian, hal ini mungkin disebabkan usaha telah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama.

PEMBAHASAN

Diantara semua variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tidak bebas, variabel iklim usaha mempunyai arah positif dan menunjukkan pengaruh paling dominan dengan koefisien variabel sebesar 0,536412. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya penguatan modal usaha kecil khususnya di Sumatera Selatan masalah iklim usa-

Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	t-statistik	Signifikansi t
Iklim Usaha	0,536412	6,264	0,0000
Perkreditan Perbankan	0,421695	4,758	0,0001
Kewirausahaan	0,057844	0,826	0,0854
Lembaga Keuangan Mikro	0,349281	3,258	0,0010
Kemitraan	0,114768	1,982	0,0030
Kredit <i>multifinance</i>	0,203823	2,624	0,0022
Constant	6,205891		
R square = 0,616598	Sig F = 0,0000		
Adj R. Square = 0,592673			
F Stat = 18,64816			

ha harus menjadi prioritas. Iklim usaha yang kondusif sebagai faktor eksternal mempunyai efek pendorong dalam mengatasi masalah-masalah lain (Hafsah, 2004).

Iklim usaha lebih menunjukkan pada kehendak politis (*political will*) dari pemerintah untuk mendorong proses pengembangan usaha kecil yang secara praktis harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. Iklim usaha merupakan suatu situasi eksternal yang memberikan lingkungan yang mendukung kegiatan usaha kecil. Iklim usaha yang mendukung juga berarti dikurangnya atau di-tiadakannya hambatan-hambatan yang tidak perlu yang menghalang-halangi pelaku usaha kecil untuk melakukan kegiatannya. Dalam konteks ini peranan pemerintah menjadi penting dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung tersebut dengan membuat kebijakan atau peraturan yang menunjang ke arah perkembangan usaha kecil berupa regulasi dan deregulasi peraturan yang mendukung perkembangan usaha kecil (Yusi, 2007).

Iklim usaha yang kondusif merupakan satu dari strategi pembiayaan usaha kecil perlu dilakukan melalui perbaikan tata kelembagaan usaha kecil dan perumusan kebijakan usaha kecil dan implementasinya, perbaikan kerangka pengaturan di tingkat nasional maupun daerah, peningkatan akses usaha kecil dan stakeholder terkait akses informasi. Iklim usaha yang tidak kondusif dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang menimbulkan inefisiensi. Berbagai macam pungutan baik legal maupun ilegal, bermacam jenis perizinan yang tumpang tindih dengan birokrasi yang rumit, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme untuk memperlancar usaha, tidak terjaminnya keamanan menunjukkan wajah buruk iklim usaha di Indonesia.

Variabel perkreditan perbankan mempunyai arah yang positif dengan nilai koefisien 0,421695, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penguatan modal usaha kecil. Artinya selain perlunya iklim usaha yang mendukung penguatan

modal usaha kecil, masalah perkreditan perbankan hendaknya perlu lebih disederhanakan.

Kekurangan modal pada usaha kecil salah satunya disebabkan keterbatasan

fasilitas perkreditan khusus untuk usaha kecil di satu pihak, dan keterbatasan mereka terhadap fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (bank) maupun nonbank (Tambunan, 2004). Adanya kecenderungan bahwa usaha kecil agak enggan menempuh jalur formal, terutama karena cukup banyaknya persyaratan administratif dan ekonomis yang harus dipenuhi. Jalur birokratik yang harus dilalui untuk memanfaatkan paket-paket kredit itu juga cenderung untuk menumbuhkan semacam sifat diskriminatif pada berbagai paket kredit tersebut. Dikarenakan kesulitan untuk memperoleh modal kerja dan investasi dari lembaga keuangan formal tersebut, sering terjadi pengusaha lebih suka mengadakan pinjaman kepada kredit swasta yang memberikan hutang relatif lebih mudah, meskipun dengan membayar bunga yang relatif tinggi.

Apabila penyaluran kredit menggunakan sistem *executing* maka dalam pelaksanaannya perbankan akan mensyaratkan lima kriteria yang dikenal dengan 5C; *character, collateral, capacity to repay, capital, condition of economy*, hal inilah yang menjadi kendala bagi usaha kecil untuk membuat akses untuk mendapatkan kredit ke perbankan, walaupun dari 5C tersebut hanya komponen *collateral* yang menjadi permasalahan bagi usaha kecil. Masalah lain tingginya suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara alamiah menutup alokasi kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah, juga bantuan penyisihan keuntungan BUMN kepada usaha kecil yang sebelumnya telah disepakati bersama antara pemerintah dengan pengusaha kurang menemui sasaran (Thohari, 2003).

Variabel kewirausahaan mempunyai arah yang positif dengan nilai koefisien 0,057844, secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap penguatan

modal usaha kecil. Berdasarkan wawancara dengan responden 78% menyatakan bahwa masalah keterampilan berwirausaha tidak menjadi pokok masalah utama karena usaha yang dijalankan rata-rata sudah cukup lama, dan mereka sudah memahami akan seluk beluk usaha yang dijalankan, di samping itu banyak yang sifatnya sudah turun-temurun. Oleh karena itu pemahaman terhadap kondisi dan fluktuasi bisnis sudah cukup biasa mereka hadapi.

Koefisien variabel lembaga keuangan mikro menunjukkan pengaruh signifikan dengan koefisien variabel sebesar 0,349281, diterimanya hipotesis ini menunjukkan keberadaan lembaga keuangan mikro juga sangat dibutuhkan bagi penguatan modal usaha kecil dalam memperoleh pinjaman dana dengan persyaratan yang ringan. Ada dua kelompok lembaga keuangan mikro di Indonesia yakni: bank terutama BRI dan BPR dan koperasi, baik koperasi simpan pinjam yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai macam koperasi. Di samping itu terdapat LKM lain yang diperkenankan baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan dan lain-lain, maupun nonpemerintah seperti yayasan, LSM, dan LKM, tetapi semua belum melakukan peran mereka dengan maksimal (Soetrisno, 2003).

Lembaga keuangan mikro sebagai mitra usaha kecil agribisnis perdesaan perlu ditingkatkan peran dan keberadaannya. Secara hipotesis, kaitan antara pemberian kredit mikro dengan pemberdayaan masyarakat merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terjadi *trickle down effect* di masyarakat karena semakin banyaknya pengusaha mikro. Keberadaan lembaga keuangan mikro walaupun dalam pembiayaan dalam skala nasional masih kecil dibandingkan dengan peran lembaga perbankan formal, namun terdapat potensi yang besar yang dapat dimanfaatkan lembaga

keuangan ini untuk memperbesar perannya dalam pembiayaan usaha kecil yang ditunjukkan dengan masih banyaknya jumlah usaha kecil yang belum memanfaatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan serta masih sulitnya akses pembiayaan dari lembaga perbankan. Sehingga tidaklah salah tumpuan terbesar usaha kecil adalah lembaga keuangan mikro (Wijono, 2005).

Koefisien variabel kemitraan adalah 0,114768, walaupun tidak besar tetapi masih menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel penguatan modal usaha kecil. Ini berarti bahwa dalam upaya penguatan modal usaha bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar merupakan alternatif yang mungkin dilakukan.

Filosofi hakiki dari kemitraan sendiri adalah kebersamaan dan pemerataan. Dengan demikian kemitraan akan selalu dibutuhkan selama tuntutan pemerataan belum teratasi (Iwantono, 2004). Dalam kemitraan usaha menengah atau besar diharapkan dapat berperan dengan melakukan alih teknologi dan pengetahuan serta kemampuan manajerial kepada usaha kecil. Dengan demikian akan berdampak pada perbaikan dan peningkatan kemampuan sumber daya usaha kecil untuk lebih profesional. Di samping itu peran usaha menengah dan besar sangat diharapkan dapat membantu permodalan yang dibutuhkan usaha kecil.

Melalui kemitraan diharapkan dapat secara cepat bersimbiose mutualistik antara usaha menengah dan besar dengan usaha kecil sehingga kekurangan dan keterbatasan usaha kecil dapat teratasi. Dalam kemitraan terkandung makna tanggung jawab moral. Pengusaha menengah atau besar untuk membimbing dan membina usaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama. Jalur kemitraan harus didasarkan atas prinsip sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling membantu (Kuncoro, 2008).

Variabel kredit *multifinance* memberikan koefisien sebesar 0,203823 dan mempunyai pengaruh positif dalam memperkuat modal usaha kecil. Dalam kredit *multifinance* yang dibutuhkan usaha kecil sebetulnya bukan hanya pengucuran dana tetapi yang lebih penting lagi pembimbingan secara intensif bagaimana manajemen usahanya. Peran perusahaan kredit *multifinance* adalah sebagai rekanan terutama dalam memelihara pembukuan penjualan.

Kredit *multifinance* merupakan alternatif dalam memperkuat modal usaha kecil. Sistem pembiayaan ini dapat berupa modal ventura, anjak piutang, penyewaan, pegadaian, dan sebagainya merupakan alternatif yang dapat digunakan usaha kecil dalam memperkuat modal usahanya. Pilihannya tergantung dari usaha kecil itu sendiri berdasarkan pada kesesuaian, kemampuan pemenuhan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pembiayaan tersebut. Modal ventura sendiri adalah salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan telah berkembang di daerah-daerah, hampir disetiap daerah telah berdiri perusahaan modal ventura yang menyediakan modal produktif bagi usaha kecil ataupun menengah.

Ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara modal ventura dengan perbankan sebagai lembaga pembiayaan, yaitu: (1) lebih *concern* terhadap bisnis mitranya; (2) pendekatan bisnis *partnership*; (3) tidak ada pembatasan sektoral; (4) memiliki unsur pembinaan; (5) suku bunga relatif stabil; (6) modal pembiayaan fleksibel; dan (7) pembiayaan untuk usaha baru (Wahyudi dalam Idris, 2006).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji beberapa konsep strategi pembiayaan yang mungkin dilakukan dalam memperkuat per-

modalan usaha kecil yang kebutuhannya makin lama dirasa makin penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembiayaan yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penguatan modal usaha kecil adalah iklim usaha, per-kreditan perbankan, keberadaan lembaga keuangan mikro, kemitraan, dan pembiayaan *multifinance*, sedangkan variabel kewirausahaan tidak berpengaruh nyata.

Kontribusi strategi pembiayaan dalam menjelaskan variansi penguatan modal mempunyai koefisien determinasi (R^2) = 0,6165, uji signifikansi statistik $F = 18,64816$. Dengan demikian membuktikan bahwa variansi penguatan modal usaha kecil agribisnis di daerah penelitian cukup dominan dipengaruhi oleh variabel model yang telah ditentukan.

Saran

Dalam rangka penguatan modal usaha kecil agribisnis di Sumatera Selatan penciptaan iklim usaha yang mendukung perlu dilakukan pemerintah dengan membuat kebijakan atau peraturan yang menunjang ke arah perkembangan usaha kecil berupa regulasi dan deregulasi peraturan yang mendukung. Kebijakan ini perlu ditempuh karena memang dalam segala hal usaha kecil masih perlu intervensi pemerintah dalam memberdayakannya, mengingat hingga saat ini usaha kecil tetap diperlukan sebagai katup pengaman bagi pertumbuhan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal.

Penelitian ini baru mengungkap implikasi model yang ditawarkan dalam upaya penguatan modal usaha kecil yang meliputi: iklim usaha, per-kreditan perbankan, kewirausahaan, lembaga keuangan mikro, kemitraan, dan kredit *multifinance*. Secara teoritis masih dijumpai variabel-variabel lain yang mempunyai pengaruh bagi penguatan modal usaha kecil tersebut, ini berarti membuka peluang bagi penelitian-penelitian berikut. Hasil dari

temuan ini tentu dapat dijadikan bahan masukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2012. *Sumsel dalam Angka*. CV Kreasi Rifi. Palembang.
- Hafsah, M.J. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Infokop*, XX(25). Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Idris, I. 2006. Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank untuk Pemberdayaan UKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, 1(2).
- Iwantono, S. 2004. Pengembangan Kemitraan Usaha Pola Sub Kontrak Berlandaskan Persaingan Sehat. *Infokop*, XX(25). Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2008. Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah, dan Pemberdayaan. *Jurnal Economic Review*, (211), Maret.
- Oswari, T. & Bastias, S.W. 2007. Anjak Piutang sebagai Alternatif Permodalan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Penetapan Dua Metode Biaya Bunga. *Seminar Ilmiah Nasional Bidang Sosial*. Universitas Gunadarma, 21-22 Agustus 2007.
- Soetrisno, N. 2003. Lembaga Keuangan Mikro: Energi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dalam Mat Syukur, dkk. *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro*. PT IPB Press. Bogor.
- Tambunan, M. 2004. Melangkah ke Depan Bersama UKM. *Makalah*. Debat Ekonomi ISEI 2004. Jakarta Convention Centre 15-16 September.
- Thohari, E.S. 2003. Peningkatan Aksesibilitas Petani terhadap Kredit Melalui Lembaga Keuangan Mikro, dalam Mat Syukur, dkk. *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro*. PT IPB Press. Bogor.
- Wijono, W.W. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Khusus (November).
- Yusi, M.S. 2007. Pemberdayaan Industri Kecil Pangan dan Pengaruhnya terhadap Kemandirian Usaha di Sumatera Selatan. *Disertasi* (Tidak Dipublikasikan). Progam Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang.